



PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DEMI MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER

Naisya Sahira

naisyasahira661@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Emilia Susanti

emilia.susanti067@gmail.com

Dosen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Patma Azizah

patmaazizah41@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sari Nabila Ahmad

sarinabiilahmad@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi penulis: *naisyasahira661@gmail.com*

Abstrak. *Women and men should be treated equally regardless of their gender, according to the idea of gender equality. Politics is the act of making decisions collectively in government to accomplish shared objectives. The primary tool for attaining gender equality in politics is women, and this essay examines their vital role in that arena. The patriarchal culture that views itself as the more suitable leader than women presents a number of challenges for women in the political sphere, despite the fact that gender equality is still a developing and deeply ingrained aspect of society. It is then unfair to place women in a competitive position due to the existence of traditional ideas, which can be considered to be highly relevant. Social interactions frequently view women as inferior human beings. The patriarchal culture that views men as holding a higher status than women is to blame for this. This study highlights the different obstacles that women have when trying to participate in politics. This study employs the library research approach, in which the gathered, examined, and comprehended materials are provided in an explanation.*

Keywords: *Women; Politics; Gender Equality.*

Abstrak. Politik adalah proses di mana individu-individu dalam pemerintahan berusaha mencapai tujuan bersama melalui kompromi. Sesuai prinsip kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan harus berperilaku sama tanpa memandang gender masing-masing. Artikel ini mengkaji bagaimana perempuan mempertahankan peran penting dalam wacana politik sebagai alat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Peran perempuan dalam ranah politik harus menghadapi banyak permasalahan karena budaya patriarki menganggap perempuan sebagai pemimpin terbaik jika dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki masih terus berlanjut dan meluas di masyarakat. Kemudian, perspektif tradisional yang bisa dibilang relevan menempatkan seseorang dalam situasi di mana mereka belum siap menjadi budak. Perempuan seringkali dianggap sebagai manusia kelas bawah di masyarakat. Fenomena ini merupakan dampak dari masyarakat patriarki, dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Studi ini mengidentifikasi banyak tantangan yang dihadapi perempuan ketika berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah materi yang telah dikumpulkan, dikaji, dan dipahami.

Kata Kunci: Perempuan; Politik; Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Dalam suatu sistem pemerintahan, politik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan menetapkan kebijakan publik untuk mencapainya. Dalam hal kuota 30% perempuan dalam politik yang ditetapkan oleh UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, telah

menyebabkan perdebatan. Ada sejumlah perempuan yang berpendapat bahwa kuota ini tidak adil karena jumlah dan membatasi potensi mereka. Sebaliknya, banyak perempuan yang mendukung kebijakan ini sebagai cara yang baik untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk masuk ke dunia politik. Oleh karena itu, politik adalah kunci untuk mencapai kesetaraan gender dan dapat menjadi alat yang kuat bagi perempuan untuk meraih kekuasaan serta mewujudkan perubahan sosial yang lebih inklusif. Hak-hak mereka yang belum terpenuhi dapat diperjuangkan melalui politik perempuan.

Peran perempuan dalam politik menjadi semakin penting dalam konteks dunia seputar ketidaksetaraan gender, khususnya dalam konteks politik global yang terus berubah. Konsep kesetaraan gender adalah gagasan bahwa Terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, namun mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban. Berangkat dari kebijaksanaan yang sedang berlangsung, salah satu aspek tertentu yang perlu diperhatikan dalam menyikapi adanya status atau kondisi masyarakat yang tidak sepenuhnya kooperatif pada sebagian besar manusia (dewasa dan anak-anak). Paradigma gender telah mengalami evolusi yang signifikan di Indonesia dan menghasilkan transformasi sosial yang besar. Salah satu perubahan penting adalah mendorong pegawai agar lebih efektif dalam melakukan advokasi hak-haknya di berbagai sektor, termasuk politik.

Kesetaraan gender telah menjadi perhatian utama dalam hubungan internasional sejak tahun 1975. Hal ini dibahas pada Kongres Dunia Pertama di Meksiko, yang menyatakan bahwa "Perempuan telah menjadi obyek untuk memajukan perdamaian baik di keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia."

Di Indonesia, kesenjangan gender mulai mengecil pada tahun 1990an. Kartini, seorang sastrawati, menggunakan surat-surat yang dibagikannya kepada teman-teman Belanda untuk mengembangkan teori ini lebih lanjut. Melalui surat ini, ia menyuarakan ketidakadilan yang diterapkan pada emas jauh, yang terkait dengan akses terhadap kesempatan dan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengalaman perempuan mempengaruhi norma gender di bidang politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara library research. Setelah mengambil kesimpulan, sumber yang telah di kumpulkan, di analisis dan dipahami kemudian di tuangkan dengan cara memaparkan. Proses pengumpulan data penelitian melalui tinjauan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca beberapa buku, jurnal, dan artikel yang membahas pertanyaan dan judul penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1968, Robbert Stoller memperkenalkan konsep “gender”, yang kini menjadi istilah yang diterima secara luas. Istilah "gender", yang berasal dari kata "sex" dalam bahasa Inggris, mengacu pada konstruksi sosial yang mendefinisikan laki-laki dan perempuan menurut peran, hubungan, dan aspek sosial lainnya. Mengingat nilai-nilai dan rutinitas sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi, gender adalah hal yang penting.

Pada tahun 1945, Pasal 28 UUD menetapkan konsep kesetaraan gender dalam politik. Menurut bunyi petikan di atas, "Sebagaimana yang ditetapkan dengan etiket berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran melalui lisan dan tulisan." Menurut ontologi, Laki-laki dan pembelajaran mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam organisasi nasional. Secara teleologis, ayat 28 UUD 1945 tidak mendukung kemajuan sosial dan pengalaman manusia (Penjelasan pasal 28 UUD 1945). Dalam bidang politik, kesetaraan gender memiliki beberapa konsep. Pertama, siapa yang berhak berpartisipasi dalam partisipasi politik? Terlebih lagi, partisme politik adalah produk sampingan dari kemajuan sosial. Ketiga, partisipasi politik merupakan asasi yang dekat dengan kemanusiaan.

Politik: Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2011, tiga pokok pokok hak pilih perempuan tidak dapat diatasi jika menyangkut kepemimpinan partai politik. Lebih khusus lagi, dalam proses banding, alokasi Sesuai dengan perubahan Subdang-Undang Nomor 55 Nomor 8 Tahun 2012, peraturan-peraturan tidak dikenakan lebih dari tiga shift dari seluruh shift kerja. Kenyataan ini memberikan bukti bahwa di bidang politik, hak-hak perempuan pada umumnya tidak terpengaruh, sehingga memberikan mereka potensi besar untuk menantang status quo di lembaga legislatif nasional, baik legislatif maupun eksekutif (Ida Fauziah, 2015). Meskipun demikian, Menurut Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, “segala warga negara harus bekerjasama dalam pendidikan hukum dan pemerintahan dan wajib mendidik hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Bagian ini menggambarkan dengan jelas konsep kemitraan dalam penelitian hukum. Setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang sosial, agama, budaya, atau lainnya, mempunyai kesamaan pemahaman terhadap hukum dan politik.

Wanita yang tidak menyadari dirinya sama dengan urusan rumah tangga berhasil menghancurkan domestik. Partisipasi aktif mereka di berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi, telah menjadi aspek penting dalam evolusi hak-hak perempuan dalam masyarakat modern. Dalam konteks politik dan demokrasi global, hak-hak perempuan sangatlah penting dalam menjamin kesetaraan gender dan penghapusan bias dalam keputusan pengambilan politik. Sentiri ini penting karena menyoroti isu-isu politik yang masih ada dalam kepemimpinan politik dan mengidentifikasi strategi pendekatan-pendekatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai partisipasi politik yang berdama. Aulia Ramadhanty dkk. (2023)

menyatakan bahwa teori gender dan perspektif feminis merupakan alat penting untuk menganalisis dinamika politik, hubungan kekuasaan, dan pengaruh sosial terhadap politik.

Saudara-saudara mempunyai hak-hak yang diawasi dan dilindungi oleh negara; Mengingat hal ini, demokratisasi penegakan hukum di pemerintahan mirip dengan hak asasi manusia, dimana negara bertindak sebagai pengawas dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan perempuan. Ada beberapa alasan penting mengapa perempuan kurang terwakili dalam politik, seperti minimnya dukungan masyarakat terhadap perempuan untuk mengejar karir, norma sosial berbasis gender yang mengutamakan peran perempuan, diskriminasi di tempat kerja berbasis gender, dan persepsi perempuan mengenai diri mereka sendiri sebagai pihak yang lemah. , wanita tidak menarik yang sering disalah artikan sebagai banyak orang lain.

Untuk mencapai identitas gender yang diinginkan, perempuan perlu mengatasi banyak kendala. Salah satu kendala signifikan yang dihadapi generasi muda dalam upaya mencapai tujuan kehidupan politik dan publik adalah adanya nilai-nilai tradisional yang melemahkan motivasi dan kemampuan mereka. Mengakomodasi bahwa perempuan seharusnya terus menjadi penghalang bagi perempuan yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang lebih luas. Oleh karena itu, terdapat tanggung jawab bersama untuk memperbaiki metode yang kurang efektif dalam memahami dan membimbing perempuan. Hal ini mengajarkan masyarakat bahwa perempuan adalah mitra, bukan bos, bagi tubuh mereka sendiri.

Untuk masuk dan sukses di ranah politik, perempuan harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat umum dan mengidentifikasi dirinya dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Di masyarakat, perempuan digambarkan sebagai individu yang memiliki empati, tidak mementingkan diri sendiri, memiliki tekad, peka, dan kasih sayang. Laki-laki digambarkan sebagai sosok yang berapi-api, agresif, rasional, dan cakap serta kritis dan analitis. Ciri-ciri penting yang diamati pada komunitas ini merupakan hasil konstruksi sosial (Silaban et al., 2015). Pemahaman masyarakat umum mengenai hak dan pemberdayaan perempuan seringkali mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik atau politik.

Dimasa datang perempuan mesti berkontribusi besar di dunia politik karena dengan menduduki posisi politik, perjuangan perempuan akan maksimal. Ikhtiyar ini sepenuh nya didukung oleh konstitusi dan regulasi politik, meskipun pelaksanaan nya masi teramat jauh dari idealitas tersebut, namun kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi perempuan untuk memengaruhi kebijakan publik, dan kita berharap perempuan Indonesia harus terus maju dan bangkit untuk mewujudkan negara yang maju dan bermartabat.

KESIMPULAN

Studi ini menyoroti pentingnya perempuan dalam politik dan tekad mereka untuk mengatasi stereotip gender. 30% pangsa suara perempuan dalam politik telah menjadi sarana yang

signifikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Namun masih terdapat beberapa stigma, seperti stigma sosial dan tingkat komunitas yang berbeda-beda. Perjuangan perempuan sejarah, tertentu di masa Kartini, sudah menunjukkan kemajuan ini. Untuk mencapai kesetaraan gender, pendidikan politik dan dukungan jaringan perempuan menjadi kunci. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di masa depan, upaya yang gigih telah menghasilkan perubahan positif dalam partisipasi politik perempuan di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih cerdas dan efektif untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Referensi

- Adinda Tasya, Elly Warnisya, Juli 2024, Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik(studi di partai keadilan sejahtera kota medan), Medan: Dinasti review.
- Aulia Ramadhanty, Neysa Neila, Ardli johan kusuma, 2023, Tantangan dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Politik Swedia dan Implikasinya.
- Dhia, Mega, Erna, Daisy, November 2023, Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Malang: Media Nusa Creative.
- Ida Fauziyah, September 2015, Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan social, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Rini Sulastri, November 2020, Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmatife Action, Bandung: Khazanah Multidisiplin.
- Vera Asihna Riris, Januari 2024, Gender dan Kebijakan Publik, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Vina, Nurul, Gonda, Guatam, November 2019, Sentisifitas Gender Dalam Partai Politik di Indonesia dan India, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.